

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG TAHUN  
ANGGARAN 2023**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN MALANG  
2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat disusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2023 (RKT TA. 2023). RKT TA. 2023 merupakan hasil tindak lanjut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024.

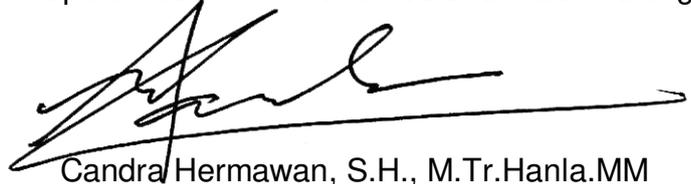
Adapun RKT TA. 2023 ini tersusun atas kerjasama antara Sub Bagian Umum, Seksi Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Malang. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2023, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan bagian implementasi *good governance dan Clean government* untuk memenuhi harapan publik akan terwujudnya lembaga pemerintahan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen RKT TA. 2023 dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Dan dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Malang, 20 Desember 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Malang



Candra Hermawan, S.H., M.Tr.Hanla.MM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

#### **1. Permasalahan**

- a. Luasnya wilayah kerja BNN Kabupaten Malang yang mencakup 33 Kecamatan di Kabupaten Malang yang tidak seimbang dengan jumlah pegawai pelaksana program P4GN di BNN Kabupaten Malang;
- b. Masih kurang efektifnya pengawasan peredaran gelap narkoba karena keterbatasan sarana dan prasarana;
- c. Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan diri akan dipenjarakan;
- d. Jumlah fasilitas rehabilitasi baik milik instansi pemerintah atau komponen masyarakat yang tidak sepadan dengan jumlah pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba;
- e. Terbatasnya jumlah anggaran untuk biaya operasional penyelidikan yang besar;
- f. Terbatasnya SDM untuk menjalankan program P4GN secara optimal;
- g. Kurangnya kepedulian dari stakeholder dalam mendukung kegiatan pemberdayaan alternatif walaupun sudah dilakukan bimtek lifeskill penyalahgunaan narkoba.

#### **2. Hasil Evaluasi**

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan masih layak pakai. Serta pengajuan pinjaman ke Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
- b. Penyebaran informasi P4GN baik elektronik maupun cetak guna menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam P4GN.
- c. Melakukan koordinasi dengan Lembaga dan instansi terkait.

### **B. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BNN Kabupaten Malang Tahun 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
11. Surat Sekretaris Utama BNN Nomor :B/4258/XII/SU/PR.01.01/2022/BNN tanggal 19 Desember 2022 tentang Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Vertikal BNN Tahun 2023.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja BNN Kabupaten Malang adalah untuk mengetahui:

1. Program dan kegiatan BNN Kabupaten Malang Tahun 2023
2. Indikator Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2023
3. Sasaran BNN Kabupaten Malang Tahun 2023
4. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan BNN Kabupaten Malang Tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan BNN Kabupaten Malang Tahun 2023.
2. Mengevaluasi Rencana Kerja Tahunan BNN Kabupaten Malang tahun sebelumnya.

3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Malang tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran BNN Kabupaten Malang Tahun 2023.
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### **D. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan.**

##### 1. Kedudukan.

BNN Kabupaten Malang adalah Instansi Vertikal untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi Jawa Timur.

##### 2. Fungsi.

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Malang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Malang;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Malang;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Malang;
- e. pelayanan administrasi BNNK Malang; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK Malang.

##### 3. Kewenangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010, kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## BAB II

### RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	<b>52.00 Indeks</b>	<b>Rp. 82.000.000</b>
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	<b>78.68 Indeks</b>	<b>Rp.100.000.000</b>
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Kabupaten Malang	<b>3.20 Indeks</b>	<b>Rp. 211.695.000</b>
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Kabupaten Malang yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	<b>5 Orang</b>	<b>Rp. 10.675.000</b>
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Kabupaten Malang	<b>3 Lembaga</b>	<b>Rp. 7.000.000</b>
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kabupaten	<b>2 Lembaga</b>	<b>Rp. 53.345.000</b>
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	-	-
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	-	-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	<b>1 Berkas Perkara</b>	<b>Rp. 45.000.000</b>
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	-
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	-
10.	Penyidikan Tindak Pidana	Meningkatnya pengungkapan	Jumlah berkas perkara tindak	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)		
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	<b>87 Indeks</b>	<b>Rp. 32.402.000</b>
Jumlah BNNK di wilayah Kabupaten Malang dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target			<b>1</b>	-	
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kabupaten Malang	<b>95 Indeks</b>	<b>Rp. 97.980.000</b>
Jumlah BNNK di wilayah Kabupaten Malang dengan Nilai IKPA mencapai target			<b>1</b>	-	
	3237				<b>Rp. 26.320.000</b>
	3239				<b>Rp. 1.088.416.000</b>
	3979				<b>Rp. 20.000.000</b>
<b>Total</b>					<b>Rp. 1.892.969.000</b>

## **BAB V PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Malang Tahun 2023 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kabupaten Malang tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kabupaten Malang selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Kabupaten Malang, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.



**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Malang**

**Candra Hermawan, S.H.,M.Tr.Hanla.,M.M**

**Lampiran**  
**Matrik Rencana Volume Rincian Output**  
**Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang**  
**Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	-
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	-
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	5 Orang
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	5 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Kabupaten Malang	Lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kabupaten Malang	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	2 Lembaga
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Lembaga
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	1 Perkara

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	-
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	-
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran Kabupaten Malang 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kabupaten Malang 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
			Layanan Perkantoran	12 Layanan